

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai pengguna, melainkan juga sebagai pengambil keputusan atas kebutuhan air yang mereka kelola. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan model ini dipengaruhi oleh kesesuaian antara kelembagaan lokal dan karakter sosial komunitas, termasuk ukuran kelompok, tingkat heterogenitas, serta modal sosial yang dimiliki. Kajian lain menegaskan bahwa keberlanjutan sistem suplai air lebih ditentukan oleh kapasitas, partisipasi, dan manajemen lokal dibandingkan intervensi pemerintah atau sektor swasta.

Fenomena makro tersebut menggambarkan karakter dasar pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources/CPR*) yang rentan mengalami penurunan kualitas apabila tidak diatur secara kolektif. Sumber daya seperti air, hutan, dan tanah memiliki sifat yang sulit dibatasi aksesnya sehingga pemanfaatan oleh satu pihak dapat mengurangi ketersediaan bagi pihak lain. Efektivitas pengelolaan CPR sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan sosial, khususnya norma bersama, jaringan sosial, dan tingkat kepercayaan antarpengguna sumber daya.

Pengawasan berbasis komunitas terbukti memainkan peran penting dalam mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya air dan menjaga keberlangsungannya. Kelembagaan lokal yang kokoh berfungsi sebagai instrumen pencegah terjadinya *tragedy of the commons*, yaitu kondisi ketika sumber daya rusak akibat lemahnya tata kelola bersama. Aksi kolektif masyarakat juga berkontribusi besar terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya ketika ditopang nilai sosial dan budaya lokal yang menjadi dasar pengambilan keputusan bersama.

Penguatan modal sosial, jaringan kerja sama, dan norma kolektif menjadi fondasi tumbuhnya kesadaran ekologis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Identitas komunitas tidak lagi terbatas sebagai penerima kebijakan

pemerintah, melainkan berkembang menjadi pengelola aktif yang merumuskan aturan internal melalui mekanisme sosial yang mereka bangun sendiri. Kesadaran ekologis tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya bersama tidak semata ditentukan oleh peran negara, melainkan juga oleh solidaritas, legitimasi sosial, dan tanggung jawab kolektif masyarakat akar rumput.

Masyarakat mengorganisasi diri melalui kelompok pengelola air, lembaga adat, dan komunitas lingkungan yang memiliki visi bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air. Partisipasi ini mencerminkan nilai kemandirian, gotong royong, dan kepercayaan sosial yang kuat sebagai fondasi tindakan kolektif. Pola partisipasi yang dominan juga mengungkap adanya ketimpangan peran karena pemerintah desa belum sepenuhnya hadir sebagai fasilitator, regulator, atau pembuat kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air.

Fenomena ketimpangan peran tersebut memperkuat urgensi kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Landasan teoretisnya selaras dengan pemikiran Elinor Ostrom (1990) yang menempatkan air, hutan, dan lahan sebagai *common-pool resources* (CPR) yang mudah tereksplorasi apabila tidak dikelola secara kolektif. Teori CPR menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk membangun aturan, norma, dan mekanisme internal yang memungkinkan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil, efisien, dan lestari tanpa ketergantungan penuh pada negara atau pasar.

Fenomena awal dalam pengelolaan Sumber Tunjung menunjukkan bahwa Menurut Irham Selaku Ketua dari Komunitas Sumber Tunjung ia mengatakan masyarakat Desa Panti memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan Pemerintah desa. Partisipasi warga tidak hanya berbentuk pemanfaatan air, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan, penyusunan aturan internal, dan pelaksanaan kegiatan konservasi. Pola tersebut menggambarkan tingginya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan sumber air,

sekaligus menunjukkan bahwa peran struktural pemerintah desa belum seimbang dengan inisiatif komunitas.

Di Desa Panti, upaya pelestarian budaya dan spiritualitas masyarakat diwujudkan melalui peran aktif Komunitas Sumber Tunjung, sebuah kelompok masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam menjaga dan mengemas tradisi lokal agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Komunitas ini telah berhasil mengemas berbagai tradisi adat seperti Sedekah Bumi dan Tilik Sumber menjadi kegiatan yang lebih terstruktur dan menarik dalam bentuk Festival Sumber Tunjung. Festival ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga sarana edukatif dan spiritual yang menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan, rasasyukur kepada Tuhan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa Panti bersama tokoh adat dan pemuda bahu-membahu menjaga kelestarian sumber air serta memperkenalkan filosofi kehidupan yang terkandung di dalamnya kepada generasi muda.

Dalam konteks ini, Komunitas Sumber Tunjung di Desa Panti sejatinya memegang peranan vital sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat, sekaligus sebagai motor penggerak kesadaran ekologis di tingkat lokal. Namun, agar upaya pelestarian yang mereka lakukan dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan payung hukum yang kuat melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) serta dukungan anggaran dan pembinaan kelembagaan dari pemerintah desa. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan yang memadai, upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat Desa Panti tidak hanya akan menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pembangunan sosial, budaya, dan spiritual yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Panti secara keseluruhan.

Dominasi peran masyarakat ini sejalan dengan konsep *common-pool resources* (CPR) yang dijelaskan Ostrom (1990), bahwa sumber daya seperti mata air bersifat sulit dibatasi aksesnya dan rentan mengalami eksploitasi apabila tidak dikelola secara kolektif. Masyarakat Desa Panti telah menunjukkan kemampuan mengelola CPR secara mandiri melalui kearifan lokal dan mekanisme sosial. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan peran karena

pemerintah desa belum berfungsi optimal sebagai fasilitator, regulator, maupun penyedia dukungan kebijakan dan anggaran

Fenomena tersebut membentuk kesenjangan empiris dan teoretis mengenai tata kelola sumber daya air yang ideal antara masyarakat dan pemerintah desa. Pengelolaan berbasis komunitas telah terbukti berjalan, tetapi tanpa dukungan kelembagaan formal, legitimasi kebijakan, dan alokasi anggaran desa, keberlanjutan pengelolaan air berpotensi melemah. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan pola pengelolaan yang menempatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam peran yang seimbang sesuai otoritas, kapasitas, dan ruang tanggung jawab masing-masing (Hamdi et al., 2023).

Fenomena mikro di Desa Panti memberikan bukti bahwa keberhasilan tata kelola berbasis kearifan lokal tidak meniadakan pentingnya dukungan negara pada tingkat desa. Kapasitas sosial masyarakat telah terbukti memadai untuk menjaga sumber air secara mandiri, tetapi keberlanjutan tata kelola membutuhkan legitimasi kebijakan agar tidak hanya bergantung pada modal sosial. Kehadiran pemerintah desa menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tidak hanya berhasil secara sosial, tetapi juga diakui secara administratif dan hukum.

Pemerintah desa memiliki dasar hukum untuk menjalankan peran tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur urusan lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik. Tanpa dukungan pemerintah desa, pengelolaan Sumber Tunjung berisiko tetap berada pada ranah swadaya, bukan pada tata kelola yang diakui secara formal.

Efektivitas pengelolaan mata air berbasis kemitraan menuntut adanya penerapan nilai-nilai pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip partisipasi memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan masyarakat, sedangkan transparansi mencegah terjadinya dominasi kepentingan tertentu. Akuntabilitas menjadi dasar agar setiap tindakan

pengelolaan memiliki tanggung jawab administratif yang jelas, baik di tingkat komunitas maupun pemerintahan desa.

Tantangan utama terlihat pada lemahnya kapasitas kelembagaan desa, kurangnya koordinasi antaraktor, dan belum terintegrasinya pengelolaan sumber air ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes atau APBDes. Kondisi ini membuat kegiatan konservasi masih bergantung pada inisiatif masyarakat tanpa dukungan kebijakan dan anggaran desa. Kesenjangan struktural ini menunjukkan perlunya strategi peran yang dapat memperkuat tata kelola berbasis komunitas sekaligus memastikan dukungan administratif desa.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG Desa 6 tentang air bersih dan sanitasi serta SDG Desa 15 tentang ekosistem darat. Revitalisasi Sumber Tunjung juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia yang menempatkan lingkungan hidup berkelanjutan dan pemerintahan desa berintegritas sebagai prioritas pembangunan. Pengelolaan sumber air bukan hanya isu ekologis, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (M. Hamdi HS et al., 2023).

Rangkaian fenomena, kesenjangan, dan landasan normatif tersebut menunjukkan perlunya pola peran yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam penyusunan kebijakan, regulasi, dan pendanaan, sedangkan masyarakat memiliki kekuatan dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan sumber air. Penelitian ini mengkaji hubungan kedua aktor tersebut melalui judul **“Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Tata Kelola Mata Air Sumber Tunjung di Desa Panti”** untuk menjelaskan dinamika peran, hambatan implementasi, dan strategi penguatan tata kelola sumber daya air berbasis komunitas yang selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena empiris, kesenjangan peran, dan landasan konseptual terkait pengelolaan sumber daya air di Desa Panti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan serta revitalisasi mata air sumber tunjung di Desa panti?
2. Bagaimana dinamika hubungan dan tantangan yang muncul dalam interaksi antara masyarakat dan Pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air?
3. Bagaimana strategi penguatan peran bersama yang dapat mendorong terciptanya tata Kelola sumber air Berbasis kemitraan sesuai prinsip pemerintahan yang baik di Desa Panti?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan serta revitalisasi sumber mata air Sumber Tunjung di Desa Panti, Kabupaten Jember. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan serta revitalisasi mata air Sumber Tunjung di Desa Panti.
2. Mengidentifikasi dinamika hubungan dan tantangan yang terjadi dalam interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air.
3. Merumuskan strategi penguatan peran bersama yang dapat mendorong terciptanya tata kelola sumber air Berbasis kemitraan sesuai prinsip pemerintahan yang baik di Desa Panti.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah nilai guna atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah praktis, maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait tata kelola sumber daya alam

berbasis masyarakat pada tingkat desa. Temuan penelitian ini menjadi penguatan konseptual mengenai relasi aktor negara dan komunitas dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) serta memperkaya literatur tentang implementasi prinsip *good governance* pada level pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan dasar bagi pengembangan model analitis mengenai kolaborasi peran aktor lokal dalam revitalisasi sumber daya alam berbasis kearifan lokal dan kelembagaan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Desa Panti dalam memperkuat tata kelola pengelolaan mata air Sumber Tunjung secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan regulasi desa, penguatan kelembagaan pengelola sumber air, serta integrasi program konservasi ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga masyarakat pengelola air dalam memperbaiki mekanisme kolaborasi, pembagian peran, dan pengawasan bersama.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa, baik pada tema pengelolaan sumber daya air, tata kelola desa, maupun kolaborasi aktor lokal. Hasil penelitian dapat dijadikan pijakan untuk memperluas studi komparatif pada wilayah lain, menggunakan pendekatan metode berbeda, atau memperdalam analisis pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada evaluasi implementasi strategi penguatan tata kelola sumber air berbasis kemitraan.